

# **LABEL HALAL DAN KONSUMEN CERDAS DALAM PERDAGANGAN PASAR BEBAS**

Oleh: Ahmad Yani<sup>\*)</sup>

## **Abstrak**

*Dunia pasar bebas tidak dapat kita tolak. Suatu saat akan melimpah barang-barang produk luar negeri yang lebih baik, murah dan berkualitas tinggi. Sesaat setelah itu akan kita dengar banyak pabrik nasional yang bangkrut, pengusaha kecil akan menutup usahanya, dan pengangguran akan terjadi di mana-mana. Di pasar bebas, para pengusaha multinasional memainkan arena WTO dengan instrumen jaminan mutu produk dan ramah lingkungan. Bangsa Indonesia dari kalangan pengusaha kecil tentu saja akan kalah bersaing. Satu hal yang dapat memainkan peranan lesensi halal. Jika label itu dapat kita mainkan diduga akan membantu perekonomian dalam negeri. Langkah konkrit untuk kearah itu adalah dibangun fondasi masyarakat konsumen agar peduli terhadap barang yang halal. Cara membangunnya adalah dengan pemberdayaan masyarakat untuk dapat memilih barang yang halal dan baik, serta yang mendukung ekonomi kerakyatan.*

**Kata Kunci:** *halal, pasar bebas, konsumen cerdas.*

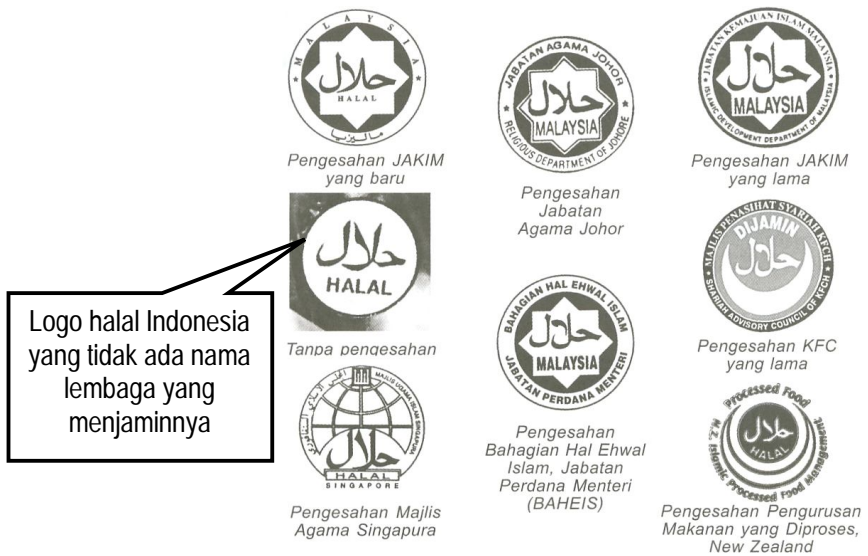
---

<sup>\*)</sup> Drs. Ahmad Yani, M.Si adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. Istilah halal hanya ada dalam komunitas muslim dan *rasanya* tidak diatur pada komunitas agama lain. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal adalah haram yang artinya “tidak dibenarkan” atau “dilarang”. Sejumlah makanan yang diharamkan dalam Al Quran antara lain babi, bangkai, darah, minuman alkohol, binatang buas (yang memakan daging), burung pemangsa, binatang yang hidup di dua alam (di darat dan di air). Di antara keduanya, terdapat makanan yang diragukan yang dikenal dengan istilah *subhat*. Barang *subhat* adalah barang yang tidak diketahui status halal dan haramnya. Bagi umat Islam, sangat dianjurkan untuk menjauhi makanan *subhat*.

Di Indonesia penggunaan label halal pada makanan produk olahan sangat mudah. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya dapat saja “ditemplei” tulisan *halal* (dengan tulisan arab), maka seolah-olah barang tersebut telah halal dikonsumsi. Konsumen Indonesia juga tidak pernah merasa ragu jika memakan barang yang telah dilabeli kata *halal*, padahal jika dicermati lebih lauh tidak sedikit yang mengandung unsur yang dilarang agama (tidak halal). Hal ini karena lembaga penjamin kehalalan di Indonesia tidak memiliki institusi yang kuat. Berbeda dengan label halal yang berlaku di Malaysia, semua barang yang dinyatakan halal dijamin oleh lembaga penjaminnya dan biasanya tertera dalam logo. Perhatikan logo-logo halal dan lembaga penjaminnya di Malaysia.



Gambar: Logo Halal yang dijamin oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan (Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 2006)

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk, tetapi nampaknya mereka hanya bekerja jika ada yang meminta dari pihak produsen. Jika tidak ada yang memintanya, MUI tidak akan mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk bersangkutan. MUI juga tidak dapat mengambil tindakan secara langsung jika ada barang di pasaran yang dicurigai mengandung unsur haram. Ada kesan, label halal hanya digunakan untuk meningkatkan omset penjualan barang dari segemen pasar kaum muslim, dan bukan sebagai kewajiban *syariah* atas suatu produk.

Berdasarkan uraian di atas tersirat adanya suatu tantangan dan peluang dari adanya hukum halal dan haram. Suatu tantangan karena kuatnya kepentingan pengusaha dan lemahnya kepedulian masyarakat terhadap *urusan* hukum halal. Sedangkan jika dilihat dari aspek peluang, masih ada jalan yang dapat ditempuh oleh masyarakat Indonesia (jika mau!) yaitu membentuk suatu lembaga penjamin kehalalan produk yang tangguh dengan segala kewenangan.

## **2. Perdagangan Bebas dan Isu label *Halal***

Perdagangan bebas memiliki aturan yang bebas, siapa yang kuat dialah yang dapat. Untuk mengatur kebebasan itu, dibentuk WTO (*World Trade Organization*). Lembaga ini walaupun masih diperdebatkan oleh berbagai pihak tetapi tetap berjalan dan masih dianggap efektif untuk membatasi kapitalisme pasar bebas. WTO adalah arena permainan yang didalamnya disepakati adanya wasit atau juri dalam mengatur permainan.

Pemain dalam arena WTO dibekali oleh suatu standar-standar mutu produk. Bagi mereka yang tidak memiliki sertifikasi jaminan mutu produk tidak diperkenankan bermain di arena WTO. Jika WTO adalah permainan kartu, produsen yang memiliki lesensi jaminan mutu produk boleh menjual barangnya ke berbagai negara, dan negara tujuan tidak boleh menolaknya (dipaksa menerima). Sedangkan produsen yang tidak memiliki jaminan mutu produk tidak diperkenankan menjual barang ke luar negeri (ekspor) bahkan negara tujuan berhak menolaknya. Permainan ini sangat menguntungkan bagi negara-negara maju yang dapat menjamin mutu produknya sedangkan negara-negara berkembang akan mengalami kesulitan untuk menyainginya.

Adanya aturan permainan tersebut, sejumlah lembaga penjamin mutu produk tumbuh bagai jamur di musim hujan. Nama-nama lembaga penjamin mutu produk antara lain adalah ISO (*International Standardization Organization*) 2000 untuk penjaminan mutu produksi, ISO 14000 yang menjamin mutu produk ramah lingkungan, ekolabel, *Superbrand* dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut asal hukumnya tumbuh dari lembaga non-pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi suatu lesensi yang diakui dalam permainan di arena WTO.

Sebagaimana telah disinggung di atas, negara maju yang memiliki modal yang besar dan mampu memenuhi standar-standar mutu produk adalah peluang yang sangat besar. Mereka dengan sejumlah lesensi mutu akan mampu melebarkan sayap wilayah pemasaran global. Barang-barang mereka akan menembus ke berbagai pelosok dunia tanpa hambatan karena secara kualitas dapat memenuhi standar yang

ditetapkan oleh lembaga penjaminnya. Sebaliknya bagi negara miskin, akan mengalami kesulitan untuk memenuhi standar mutu internasional. Karena itu, jika kondisi ini terus menerus dibiarkan akan banyak barang-barang produksi dari negara berkembang yang tertahan di pelabuhan dan bandar-bandar udara Internasional.

Dengan melimpahnya barang-barang produksi industri maju masuk ke negara berkembang, barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri (di negara berkembang) akan kalah bersaing. Akibatnya barang produksi dalam negeri tidak laku dijual, yang pada akhirnya banyak pabrik yang bangkrut. Dampak dari itu semua dapat dipastikan yaitu akan banyak karyawan yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), perekonomian nasional akan hancur, dan semakin surut sebagai negara yang sangat miskin.

Selain standar mutu produk, akhir-akhir ini para kapitalis di arena WTO sudah mencoba membeli atribut standar lingkungan dan nilai kehalalan barang. Mekanisme "penjagalan" barang dari sentra-sentra pertanian negara berkembang sama dengan penjagalan standar mutu. Negara berkembang yang telah lama menggunakan pupuk kimia dalam usaha pertanian (seperti Indonesia), secara otomatis akan ditolak di pasar internasional karena tidak bebas dari bahan kimia. Barang-barang pertanian dari Indonesia akan terjegal karena tidak ramah lingkungan.

Untuk mengimbangi ketatnya persaingan pasar global, sejumlah negara termasuk Indonesia membuat institusi standar mutu produk sendiri (seperti SNI = Standar Nasional Indonesia) dan kode etik ramah lingkungan atau *ekolable*. Cara ini adalah untuk merebut pasar dalam negeri sendiri dan menyaingi keunggulan produk barang luar negeri yang melimpah. Lembaga penjamin produk ramah lingkungan Indonesia adalah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dengan logo sebagai berikut:



## Ramah Lingkungan

Gambar: Tanda Ekolabel Indonesia  
(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2004)

Baik lesensi ISO, ekolable, atau lainnya sebenarnya bebas diambil atau tidak diambil oleh setiap perusahaan. Pemilikan sertifikat ISO 14000 atau ekolable bukanlah suatu keharusan, tetapi jika sebuah perusahaan ingin memilikinya maka dijamin akan dapat lolos di pasar dunia. Kepemilikan sertifikat ISO dan sertifikasi ekolable lainnya mempunyai nilai besar dalam persaingan dagang, karena itu banyak perusahaan yang ingin memilikinya.

Dengan analogi sertifikasi ISO dan label ramah lingkungan, apakah mungkin label halal dijadikan instrumen pasar bebas dunia?. Masyarakat muslim Malaysia telah dapat diajak untuk hidup dalam konstelasi global. Mereka tidak akan membeli barang yang tidak berlogo jaminan halal. Dengan demikian, muslim taat di Malaysia akan membeli barang yang halal saja. Karena lembaga penjamin produk halal sangat ketat maka kasus manipulasi barang halal dapat ditekan.

Berbeda dengan di Indonesia, sering kali kita mendengar adanya kasus barang yang mengandung unsur babi (barang haram) padahal barang tersebut berlogo *halal*. Kita juga tidak tahu persis barang manakah yang mengandung lemak babi di sejumlah permen, susu, coklat, margarin, dan lain-lain karena kita tidak memiliki lembaga penjamin kehalalan. Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia kurang peduli terhadap label halal sehingga terasa "aman-aman" saja.

Sebenarnya terlepas dari besar-kecilnya ketaatan kita terhadap hukum halal dan haram, Indonesia jika mau dapat memanfaatkan isu

kehalalan produk. Produk barang yang berasal dari luar negeri dapat kita batasi oleh lesensi produk *halal*. Walaupun permainan WTO (standar mutu dan ramah lingkungan) bangsa Indonesia kalah telak dari negara maju, tetapi jika label halal dapat dimainkan maka *rasanya* kita dapat menjadi pemenang, setidaknya untuk pasar negara muslim. Jika masyarakat Indonesia juga peduli terhadap logo halal maka serbuan produk luar negeri (yang tidak halal) tidak akan laku di Indonesia.

### **3. Konsumen cerdas modal hidup di dunia pasar bebas**

Pasar bebas tidak dapat dibendung lagi. Untuk menghadapi pasar bebas, pemerintah memacu dan membina produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar bebas. Satu hal yang belum terlihat adalah keinginan pemerintah untuk mendidik masyarakat dalam memilih barang. Sampai saat ini penulis belum mengetahui apakah pemerintah telah mendidik masyarakat untuk cerdas memilih barang-barang konsumsinya?. Barangkali baru iklan layanan masyarakat untuk memilih produk nasional yang berlogo SNI. Namun untuk membina sikap mental yang berfihak terhadap produk dalam negeri belum terlihat dengan jelas. Pendidikan masyarakat untuk memilih barang ramah lingkungan dan dijamin halal belum dilakukan oleh pemerintah dan atau pihak lainnya.

Dalam dunia pasar bebas, konsumen harus cerdas memilih. Ada tiga komitmen kecerdasan konsumen yang perlu diperhatikan dalam pasar bebas yaitu:

#### **a. Cerdas memilih produk yang halal**

Memilih produk yang halal adalah mutlak bagi komunitas muslim. Indonesia yang mayoritas muslim seharusnya menyadari bahwa kehalalan produk menyangkut urusan dunia dan akhirat. Ketaatan seorang muslim diukur salah satunya dari cara ia berdisiplin memilih produk yang halal. Sekecil apapun barang yang telah tercampur dengan barang yang haram tidak boleh dimakan atau dipakai.

Untuk mencapai kecerdasan, konsumen harus mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam makanan. Saat ini, dengan teknologi

yang sangat canggih sangat sulit membedakan barang yang haram dan halal. Dari barang yang kita makan seperti permen, kue, dan penyedap rasa sangat sulit dibedakan. Selain itu barang-barang konsumsi lainnya seperti sabun mandi, kosmetik, pewangi, dan lain-lain bisa jadi terkandung barang haram yang kita sendiri tidak menyadarinya. Berikut adalah unsur (komposisi) barang haram yang digunakan dalam makanan seperti diglisarida, gelatin, gliserin, lesitin, dan renet. Selain makanan olahan, barang haram bisa juga masuk dalam tanaman yang diciptakan melalui penambahan plasma darah dan bioteknologi.

Penjelasan di atas adalah sekelumit dari unsur-unsur yang dapat "mencemari" makanan kita sehari-hari. Intinya adalah bahwa masyarakat Indonesia yang masih peduli terhadap *syariat* halal, hendaknya hati-hati. Di sinilah kita perlu pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu memilih barang yang dapat dikonsumsi dengan aman.

Tulisan ini tidak menekankan meminta pemerintah untuk mendirikan lembaga jaminan halal, tetapi meminta semua pihak agar peduli terhadap kehalalalan produk. Adanya lembaga penjamin kehalalalan produk belum tentu efektif karena dapat ditipu dan *dibohongi* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi melalui pemberdayaan konsumen, semua pihak dapat mengawasinya. Dengan cara ini, konsumen akan lebih berhati-hati dan tidak asal percaya terhadap iklan-iklan produk berlogo halal di pasaran.

Dalam konteks pasar bebas, pemberdayaan masyarakat peduli barang halal adalah modal utama untuk melindungi negaranya dari serbuan barang-barang luar negeri. Selain itu, para pengusaha dalam negeri didorong untuk menciptakan produk-produk yang 100% halal. Dampaknya sudah dapat diduga yaitu walaupun di tanah air telah melimpah barang-barang dari luar negeri tetapi karena status kehalalannya diragukan maka tidak akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.



b. Cerdas memilih produk yang baik

Dalam tulisan ini produk yang baik adalah produk yang aman untuk kesehatan tubuh, mendukung kehidupan sosial yang harmonis, dan membangun budaya yang beradab. Produk yang baik untuk kesehatan biasanya berdampingan dengan unsur kehalalan produk (ada istilah *halalan thayiban*). Akhir-akhir ini banyak sekali makanan yang diberi bahan pengawet, zat pewarna, mengandung pestisida, dan lain-lain. Produk ini jelas sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh. Jenis makanan yang tidak baik umumnya terdapat pada jajanan anak-anak. Dengan warna yang menarik dan kadungan MSG yang tinggi, atau minuman yang berkarbonasi sangat laku di pasaran.

Tidak hanya dari jenis makanan, alat rumah tangga, meubeler, bahkan kloset harus mencari produk yang baik. Contoh sederhana masalah kloset buang air kecil yang berdiri dan kloset buang air yang duduk. Di rumah-rumah orang muslim masih ada yang merasa bangga (merasa kaya dan merasa telah *gaful*) jika di rumahnya telah mampu membeli kloset berdiri dan kloset duduk. Padahal keduanya sangat tidak baik bahkan dilarang hukum agama. Kencing tidak boleh berdiri dan jika buang air besar hendaknya jongkok (bukan duduk). Pandangan ahli kesehatan dari timur mengajarkan, jika kencing sambil berdiri dan buang air besar sambil duduk maka kotoran yang dibuang tidak seluruhnya keluar, masih ada yang tersisa. Pengetahuan semacam ini jarang sekali dipublikasikan karena akan mengundang wacana kontroversi, tetapi jika produk ini dianggap baik menurut syariah maupun kesehatan seharusnya dipilih oleh konsumen Indonesia.

Produk yang baik lainnya adalah yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis. Aspek ini dari unsur *fashion* atau gaya hidup berpakaian. Di Argentina, konon telah dilarang mode pakaian yang ketat. Alasannya model tersebut telah mendorong anak muda untuk menurunkan berat badannya agar terlihat ramping dan serba bisa menggunakan berbagai pakaian ketat. Efek sampingnya, para remaja

Argentina banyak yang diet berlebihan sehingga banyak yang sakit. Kebijakan pemerintah sangat tepat dalam konteks pasar bebas, karena dapat memilih pakaian yang sesuai kehendaknya. Di Indonesia, semua mode pakaian dibebaskan tanpa ada kajian yang mendalam untuk kesehatan rakyatnya sendiri.

Produk baik lainnya adalah yang dapat membangun budaya yang beradab. Langkah para pengusaha dalam memasarkan produk biasanya melalui dunia hiburan (*fun*). Dalam dunia hiburan, Indonesia kalah tertinggal sehingga isme dari luar negeri lebih dominan merasuki generasi muda daripada *isme* yang membina budaya luhur bangsa Indonesia.

Contoh konkrit kekalahan isme budaya pop di Indonesia adalah dalam kasus Inul Daratista. Terlepas pro-kontra terhadap cara *ngebor* Inul, yang jelas pihak Rhoma Irama yang menjunjung asas kepatutan berkesenian kalah pamor oleh sosok Inul. Dunia *entertainment* mengusung Inul pulang kampung sebagai pahlawan yang di-*dholimi*, diarak, dielu-elukan dan dibela oleh para pengacara yang handal. Perlawanan yang dilakukan oleh Rhoma Irama dilecehkan tanpa diberi ruang publik dalam *info-tainment*, sehingga dengan sendirinya keburukan berkesenian tertutupi oleh publikasi gencar pembelanya.

Kembali ke pembicaraan awal, jika masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk memilih barang yang baik dari unsur *food*, *fashion*, maupun *fun* maka bangsa kita memiliki modal untuk menerima atau menolak barang yang datang dari luar. Sampai saat ini gagasan tersebut masih utopia karena ketiga unsur kesenangan itu masih dikendalikan oleh orang lain. Melalui pemberdayaan masyarakat yang rasional, dibarengi dengan pengembangan produk dalam negeri yang baik maka tidak mustahil kita dapat menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

- c. cerdas memilih produk yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan  
Gagasan ini didasarkan pada semangat nasionalisme. Setelah masyarakat mampu memilih barang yang halal dan baik, kriteria

ketiga lainnya adalah bersedia dan *komitmen* untuk setia terhadap produk dalam negeri terutama yang dihasilkan oleh para pengusaha kecil. Gerakan ini secara pribadi kurang berarti tetapi jika dilakukan secara bersama-sama maka hasilnya akan cukup signifikan.

Dalam konteks perdagangan global, sektor usaha kecil dapat mempertahankan perekonomian dalam negeri. Walaupun modalnya kecil tetapi dapat berputar di dalam negeri. Sebaliknya jika membeli barang produk luar negeri (sekecil apapun) maka keuntungannya akan mengalir ke luar negeri. Walaupun tidak mungkin seluruh produk kebutuhan hidup dihasilkan dari pengusaha kecil, tetapi minimal barang yang kita pilih adalah barang yang memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.

Apakah kita perlu gerakan anti barang luar negeri?. Dalam konteks ini belum dianjurkan. Sebagai ilustrasi, jika ada dua pedagang ayam goreng dengan rasa yang sama, tetapi yang satu lebih menguntungkan bagi rakyat Indonesia maka pilihlah ayam goreng tersebut (tentu saja telah lolos dari kriteria pertama dan kedua yaitu halal dan baik).

Dalam kasus lain konsumen Indonesia juga jangan mudah tertipu oleh karena pengusaha ayam goreng itu warga dan bangsa Indonesia. Seandainya Sang Pengusaha ayam goreng sering berbelanja ke luar negeri (artinya hasil keuntungan dari berdagang ayam goreng-nya dibelanjakan ke luar negeri, *pen*) maka ayam goreng Si pengusaha itu tidak baik untuk dibeli lagi. Itulah makna komitmen yang berfihak pada ekonomi kerakyatan, yang panjang cerita urusannya dan rumit.

Ketiga kecerdasan di atas nampaknya belum disampaikan kepada khalayak umum. Pemerintah belum melakukan pemberdayaan masyarakat Indonesia (sebagai konsumen) dalam menghadapi pasar bebas. Bangsa Indonesia tidak dapat menolak kesepakatan WTO (karena jika menolak kita akan dikucilkan dunia), tetapi yang paling penting adalah bagaimana rakyat Indonesia mampu dan berdaya memilih barang konsumsinya sesuai kriteria-kriteria di atas.

Sebagai konsumen, bangsa Indonesia berhak memilih barang yang akan dibelinya. Konsekwensinya, mereka yang berdagang di tanah air janganlah marah jika barang dagangan Anda tidak laku di sini, karena bangsa Indonesia memiliki hak pilih yang merdeka. Jika ingin laku maka "langkah" dulu lembaga penjamin kehalalan produk, penjamin kebaikan produk, penjamin ramah lingkungan, dan penjamin ramah ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh rakyat Indonesia.

#### **4. Penutup**

Bagi pengusaha kapitalis pasar bebas, Indonesia adalah pasar potensial. Nusantara dengan jumlah penduduk lebih dari 210 juta adalah daerah "koloni" yang menghasilkan uang bagi kaum imperialis. Karena itu satu kata yang dikemukakan oleh para kapitalis adalah bagaimana cara memelihara bangsa Indonesia agar tetap tergantung terhadap produk-produknya.

Pola pikir semacam ini sangat wajar dan rasional. Karena itu disadari atau tidak mereka telah mengeluarkan biaya yang besar untuk tujuan itu. Dari satu sisi saja, seperti dari produksi bahan pangan pertanian; kita telah terjebak dalam lingkaran setan. Awalnya kita diberi rasa bangga dapat melipatgandakan hasil pertanian dengan pupuk kimia, tetapi kurang dari 50 tahun kita menjadi sengsara. Lahan-lahan pertanian sangat rendah produktivitasnya yaitu hanya rata-rata 3,5 - 4 ton/hektar. Sementara itu kebutuhan pangan semakin tinggi karena pertambahan jumlah penduduk, akhirnya kita mengeksport beras (dan bahan pangan lainnya seperti jagung dan kedelai).

Tahun pertama mengimpor bahan pangan adalah awal dari ketergantungan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. Selanjutnya merembet ke berbagai jenis kebutuhan hidup lainnya seperti bahan bakar, teknologi kendaraan bermotor, pakan ternak, obat-obatan, bahkan teknologi perang. Semuanya adalah kebutuhan pokok bangsa Indonesia yang diperoleh dari luar negeri.

Untuk mengurangi ketergantungan yang semakin kuat, penulis berkeyakinan bahwa pemberdayaan konsumen yang cerdas adalah langkah awal untuk bangkit dan melepas diri dari belenggu pihak lain. Salah satu harapan untuk dapat “bermain” dalam perdagangan pasar bebas adalah bermain dengan produk halal. Biarkan orang lain bermain dengan kartu *As* mutu produk dan ramah lingkungan, tapi ambillah kartu *As* label halal yang dapat kita mainkan untuk ketahanan ekonomi nasional bangsa Indonesia.

Penulis telah menyampaikan, setidaknya telah gugur kewajiban. Jika ada respon yang positif semua pihak sebaiknya dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai dari sekarang. Sejak adanya kesadaran produk halal, kami sekeluarga menjadi bingung memilih barang di supermarket. Namun kami tetap bersyukur karena masih banyak makanan yang halal walaupun harus lebih hati-hati. Kami terus berdiskusi dan memacu diri mencari wawasan tentang produk alternatif yang terjaga kesuciannya, yaitu halal, baik, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

### **Daftar Pustaka**

- Norris, Robert & Haring Liyod. 1980. *Political Geography*. Charles E. Merrill Publishing Company A Bell & Howell Company. Columbus, Toronto, London, Sydney.
- Perdagangan internasional - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia\_files
- Mittelman, J.H. 2000. *Gloibalization, Peace and Conflict*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi-Malaysia.
- Gunadi, J. 2001. *Propaganda Kolonialisme*. Tersedia di <http://www.rnw.nl/ranesi/html/globalisasi.html>.
- Yudho H.S. 2002. *Membangun Kemandirian di Bidang Pangan: Suatu Kebutuhan Bagi Indonesia*. [online]. Tersedia <http://www.ekonomirakyat>
- Gray, J.D. 2005. Bayang Gurita. Iqra insan press. Jakarta.
- Shoelhi, M. 2007. Diambang Keruntuhan Amerika. Grafindo Khasanah Ilmu. Jakarta.